

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Syahrus Sikti, *Menggugat Kepastian Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2022).
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Andi Widiatno Hummerson, *Perlindungan dan Tanggungjawab Hukum Kebocoran Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik Pasca Terbitnya UU PDP Nomor 27 Tahun 2022*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2024).
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989).
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017).
- Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2017).
- H. Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum” (Jakarta, Sinar Grafika, 2019).
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).
- J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996).
- Jannus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010).
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta, Kencana, 2016)

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993).

M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1979).

Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2017).

Niuewenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragi, (Surabaya : Universitas Airlangga, 1985).

Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Depok: Rajagrafindo, 2017.

Setiono, Disertasi : “*Rule of Law*”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010).

Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020).

Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011).

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013)

Jurnal:

Agus Budianto dkk, *Barcoding Digital Signature Authencity Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana*, Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, April 2021.

Bezanson dalam Daniel Zeeuw, “Immunity from the image: The Right to privacy as an antidote to anonyumus modernity”, *Ephemera Journal*, Vol. 17, No. 2, 2017, Hal. 256-281.

Florianus Yudhi Priyo Amboro & Viona Puspita, *Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Norwegia)*, Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences, Volume 1 Nomor 1, Maret 2021.

Mario Julyano & Aditya, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2019, Hal. 13-22.

Nihal Jayawickrama, *The Judicial Application of Human Rights Law, National, Regional and International Jurisprudence*, (New York : Cambridge University Press, 2006), Hal, 605.

R Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, **Jurnal Legislasi Indonesia**, Vol. 13 No. 02, 2016, hal. 192.

Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Data Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia”. *Jurnal Yustitia*, Vol. 5, No.1, 2016, Hal. 23.

Tejomurti, dkk, “Legal Protection for Urban Online Transportation-User’s Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology”. *Padjajaran Journal of Law*, Vol. 5, No. 3, 2018, Hal. 485-505.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 350, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5628)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5861)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.03/2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6090)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6759)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6788)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62/OJK)

Ketentuan Pelaksanaan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 tentang Laku Pandai;

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 /SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum;

Website/Internet:

[Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi \(hukumonline.com\)](https://www.hukumonline.com), diakses pada Sabtu, 05 Oktober 2024, Pukul 09.18 WIB.

Zefanya Aprilia, Data 370 Ribu Nasabah BTN Bocor? Ini Tanggapan Manajemen, CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240703105948-17-551355/data-370-ribu-nasabah-btn-bocor-ini-tanggapan-manajemen>, diakses pada Kamis, 31 Oktober 2024.

<https://dqlab.id/mengenal-macam-analisis-dengan-metode-analisis-data-sekunder#:~:text=Analisis%20data%20sekunder%20adalah%20analisis%20data%20yang%20dilakukan%20terhadap%20data,%2C%20bappenas%2C%20laporan%20bulanan%20perusahaan.>, diakses pada Kamis, 31 Oktober 2024, Pukul 23.45 WIB.

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=KBBi%20mengartikan%20perlindungan%20sebagai%20hal,dikukuhkan%20oleh%20penguasa%20atau%20pemerintah.>, diakses pada Sabtu, 19 Oktober 2024, pukul 11.46 WIB.

Muhammad Idris, Kompas.com, 30 Juni 2024, "Kepanjangan PIN dan Bedanya dengan Password", <https://money.kompas.com/read/2024/06/30/000700826/kepanjangan-pin-dan-bedanya-dengan-password?page=all>, diakses pada Jumat, 01 November 2024, pukul 22.18 WIB.

CNN Indonesia, "Daftar Dugaan Kebocoran Data 2023, Termasuk Data Pemilih dan Bank", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231231054937-192->

[1043657/daftar-dugaan-kebocoran-data-2023-termasuk-data-pemilih-dan-bank/1.](https://www.cnbcindonesia.com/market/20240703105948-17-551355/data-370-ribu-nasabah-btn-bocor-ini-tanggapan-manajemen), diakses pada Sabtu, 02 November 2024 pukul 17.45 WIB.

Zefanya Aprilia, CNBC Indonesia, “*Data 370 Ribu Nasabah BTN Bocor? Ini Tanggapan Manajemen*”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240703105948-17-551355/data-370-ribu-nasabah-btn-bocor-ini-tanggapan-manajemen>, diakses pada Sabtu, 02 November 2024 pukul 18.56 WIB.

Wildan Mukhlisah Sy, Suara Indonesia, “*Dugaan Kebocoran Data di Bank Mandiri Sumenep, Nasabah Terjebak Transaksi Fiktif*”, <https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa/66f539b4d8f2f/Dugaan-Kebocoran-Data-di-Bank-Mandiri-Sumenep-Nasabah-Terjebak-Transaksi-Fiktif>, diakses pada Sabtu, 02 November 2024 pukul 19.02 WIB.

Antara Jatim, “*Sidang perdana gugatan kebocoran data nasabah, Bank Mandiri mangkir*”, <https://jatim.antaranews.com/berita/715149/sidang-perdana-gugatan-kebocoran-data-nasabah-bank-mandiri-mangkir>, diakses pada Sabtu, 02 November 2024 pukul 19.07 WIB.

Wacanabali.com, “*Bank Mandiri Disomasi Kuasa Hukum Korban Kebocoran Data Pribadi*”, <https://wacanabali.com/2024/02/21/bank-mandiri-disomasi-kuasa-hukum-korban-kebocoran-data-pribadi/>, diakses pada Sabtu, 02 November 2024 pukul 19.39 WIB.

Oktarina Paramitha Sandy, *12 Kasus Kebocoran Data di Indonesia Sejak 2019*, <https://m.cyberthreat.id/read/12752/12-Kasus-Kebocoran-Data-di-Indonesia-Sejak-2019>, diakses pada Minggu, 03 November 2024 pukul 18.17 WIB.

<https://ojk.go.id/id/pages/laku-pandai.aspx>, diakses pada Sabtu, 12 Oktober 2024, pukul 22.31 WIB.

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Adrian Munich, Pengawas Senior Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, Aplikasi *WhatsApp Call*, Tanggal 25 Oktober 2024.